



# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

<sup>1</sup>Riris Nurjanah, <sup>2</sup>Arvian Triantoro, <sup>3</sup>Raden Dian Hardiana

<sup>123</sup>Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia  
Correspondence: E-mail: [ririsnurjanah@upi.edu](mailto:ririsnurjanah@upi.edu)

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue and capital expenditure on regional financial independence with economic growth as a moderating variable. The research method used is descriptive verification with a quantitative approach. The data collection technique used is a documentation study through secondary data obtained from the official website of DJPK and BPS West Java Province. By using the census sampling technique, this study used all members of the population consisting of 27 district / city local governments in West Java Province in 2018-2022. Hypothesis testing was carried out using panel data regression analysis and moderation variable regression analysis through Eviews 12. The results showed that local revenue has a positive effect on regional financial independence, capital expenditure has a positive effect on regional financial independence, economic growth does not moderate the effect of local revenue on regional financial independence, and economic growth does not moderate the effect of capital expenditure on regional financial independence.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 1 July 2024

First Revised 1 August 2024

Accepted 10 November 2024

First Available online 10 December 2024

Publication Date 10 December 2024

#### Keyword:

Regional Original Revenue, Capital Expenditure, Regional Financial Independence, Economic Growth.

## 1. INTRODUCTION

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada era reformasi tahun 1998 melahirkan adanya otonomi bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa adalah otonomi daerah adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pada hakikatnya, otonomi daerah diorientasikan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah, kesejahteraan rakyat, prakarsa masyarakat, dan pendayagunaan potensi daerah (Ishak et al., 2020). Dengan demikian, lahirnya otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Salah satu aspek yang paling krusial dalam penyerahan otonomi daerah adalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola keuangannya, yang berimplikasi pada tingkat kemandirian keuangan masing-masing daerah. Kemandirian ini mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai urusan-urusan pemerintahannya dengan menggunakan sumber daya keuangan yang dihasilkan sendiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Berikut disajikan data distribusi provinsi di wilayah Indonesia berdasarkan kategori kemandirian menurut Badan Pusat Statistik dari tahun 2019 hingga 2022.

Tabel 1. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Kemandirian Tahun 2019-2022

KATEGORI KEMANDIRIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Rendah Sekali (0-25%)	10	8	7	5
Rendah (>25-50%)	16	18	19	16
Sedang (>50-75%)	8	8	8	13
Tinggi (>75%)	0	0	0	0
Jumlah Total	34	34	34	34

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Data yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, rata-rata kemandirian keuangan provinsi di Indonesia masih berada dalam kategori rendah. Sebesar 73 persen provinsi di Indonesia berada dalam kategori rendah dan rendah sekali, sedangkan sisanya sebesar 27 persen berada dalam kategori kemandirian keuangan sedang. Namun, belum terdapat provinsi yang memiliki kategori kemandirian keuangan yang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia belum mampu sepenuhnya

melaksanakan otonomi daerah dan masih bergantung pada bantuan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Jawa Barat telah melakukan analisis atas kemandirian keuangan pada berbagai pemerintah daerah yang tersebar di wilayah Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

KATEGORI	JUMLAH PEMDA	SEBARAN (Diurutkan Dari Nilai Tertinggi Ke Terendah)	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN
Sangat Baik (>50%)	3 Pemda	Kab. Bekasi	53,43%
		Kota Bogor	52,83%
		Kota Bekasi	51,19%
Baik (40,01%-50%)	4 Pemda	Kota Depok	47,51%
		Kab. Bogor	41,62%
		Kota Bandung	41,18%
		Kab. Karawang	40,82%
Cukup (30,01%-40%)	3 Pemda	Kota Cimahi	36,10%
		Kota Cirebon	34,12%
		Kota Sukabumi	32,47%
Sedang (20,01%-30%)	4 Pemda	Kab. Purwakarta	27,16%
		Kab. Bandung Barat	23,26%
		Kab. Cirebon	20,68%
		Kota Banjar	20,23%
Kurang (10,01%-20%)	8 Pemda	Kab. Bandung	19,37%
		Kab. Sukabumi	18,06%
		Kab. Majalengka	16,10%
		Kab. Sumedang	15,38%
		Kab. Subang	15,35%
		Kab. Cianjur	15,01%
		Kab. Garut	11,23%
		Kab. Ciamis	10,75%
Sangat Kurang (0,00%-10%)	5 Pemda	Kab. Pangandaran	9,66%
		Kab. Indramayu	9,04%
		Kab. Tasikmalaya	8,67%
		Kota Tasikmalaya	6,77%
		Kab. Kuningan	0,94%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Jawa Barat (2024)

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh DJPb Kanwil Jawa Barat, diketahui bahwa dari 27 pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, hanya terdapat 3 pemerintah daerah dengan rasio

kemandirian keuangan dalam kategori yang sangat baik. Rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan nilai rasio 53,43 persen, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki rasio keuangan daerah terendah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan nilai rasio sebesar 0,94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan masih bergantung pada bantuan serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dalam sistem pembiayaan maupun pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Jika pemerintahan daerah belum mandiri dan masih memiliki kategori kemandirian keuangan daerah yang rendah, maka hal ini akan menimbulkan beberapa kekhawatiran khususnya bagi pembangunan daerah. Hal tersebut diantaranya berupa keterbatasan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penurunan kualitas pelayanan publik, dan terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Halim & Iqbal (2012) menyebutkan bahwa potensi pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan untuk memiliki kemandirian keuangan yang meningkat. Selain dari sisi penerimaan, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan adanya upaya untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah ini berkaitan dengan kegiatan belanja yang dilakukan oleh suatu daerah, terlebih pada aktivitas belanja modal. Belanja modal dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah jika diarahkan dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik (Mardiasmo, 2018). Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang pada dasarnya menggambarkan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pihak yang memberikan kuasa dan agen sebagai pihak yang menerima kuasa untuk mengelola sesuatu atas nama prinsipal. Dalam konteks keuangan daerah, pemerintah daerah bertindak sebagai agen untuk mengelola sumber daya keuangan atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengelola sumber daya keuangan daerah, termasuk pendapatan asli daerah dan belanja modal secara efektif guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat fenomena yang telah diuraikan dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi".

## 2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk melihat gambaran pendapatan asli daerah, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022. Sedangkan metode verifikatif akan digunakan untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap

kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022 dengan dimoderasi oleh variabel pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Adapun sampel pada penelitian ini terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data digunakan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait laporan keuangan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis regresi variabel moderasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji keberartian regresi (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi (uji t).

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### Analisis Deskriptif

Pembahasan dari hasil penelitian diperoleh melalui pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan. Sebelumnya, dilakukan analisis deskriptif terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2018-2022

Variabel Penelitian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PAD (%)	Min.	6,98	7,52	6,70	10,23	9,69
	Max.	43,29	43,00	42,89	45,26	44,81
	Mean	21,67	21,62	21,80	23,80	24,82
	Std. Dev	11,29	11,46	10,62	11,11	11,59
BM (%)	Min.	8,84	9,50	6,65	7,57	5,92
	Max.	27,85	34,15	29,68	27,85	25,08
	Mean	17,18	18,60	13,93	14,16	13,35
	Std. Dev	4,77	5,26	5,48	4,85	4,85
KKD (%)	Min.	9,30	10,04	10,37	12,41	10,69
	Max.	62,89	58,29	54,62	59,73	58,04
	Mean	26,50	26,74	26,78	28,90	29,19
	Std. Dev	14,56	14,65	13,32	14,26	14,27
PE (%)	Min.	1,34	3,20	-3,80	0,58	2,88
	Max.	7,08	7,85	0,94	5,85	6,63

Mean	5,67	5,62	-1,34	3,49	5,11
Std. Dev	1,05	1,06	1,12	0,85	0,70

Sumber: Data Diolah Dalam Ms. Excel

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diketahui bahwa perolehan rasio PAD di Provinsi Jawa Barat mengalami kondisi fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat dalam rentang tahun 2018-2022. Nilai minimum PAD menunjukkan variasi yang relatif kecil. Nilai maksimum dari rasio PAD cukup stabil, walaupun terjadi sedikit peningkatan di tahun 2021. Selanjutnya, nilai rata-rata rasio PAD mengalami peningkatan dari 21,67% pada tahun 2018 menjadi 24,82% pada tahun 2022, yang mengindikasikan peningkatan kapasitas daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli. Sedangkan standar deviasi dalam rentang tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi stabil yang mengartikan bahwa variasi di antara daerah tidak mengalami perubahan signifikan.

Perolehan rasio belanja modal di Provinsi Jawa Barat mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun dalam rentang tahun 2018-2022. Nilai rasio belanja modal memperlihatkan penurunan yang signifikan setelah tahun 2019, terutama pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nilai minimum rasio belanja modal pada tahun 2020 dan 2022 menurun tajam, menunjukkan pengurangan dalam investasi modal. Nilai maksimum rasio belanja modal mencapai puncaknya pada tahun 2019 dan kemudian menurun, yang mencerminkan kesulitan beberapa daerah dalam mempertahankan tingkat investasi dari aktivitas belanja modal yang tinggi. Selanjutnya, nilai rata-rata rasio belanja modal juga menunjukkan penurunan yang signifikan setelah tahun 2019. Selain itu, standar deviasi rasio belanja modal berada pada kondisi stabil yang menunjukkan variasi yang konsisten di antara daerah, meskipun terjadi penurunan.

Rasio kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2018-2022. Nilai minimum kemandirian keuangan daerah meningkat pada tahun 2021 namun menurun kembali pada tahun 2022, menunjukkan adanya ketidakstabilan kemandirian keuangan di beberapa daerah. Selanjutnya, nilai maksimum kemandirian keuangan daerah relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah juga meningkat dari 26,50% pada tahun 2018 menjadi 29,19% pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan standar deviasi kemandirian keuangan daerah berada pada kondisi yang stabil dan menunjukkan variasi yang konsisten di antara daerah selama tahun 2018-2022.

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai rasio pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam rentang tahun 2018-2022. Rasio pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi signifikan, terutama dengan adanya kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, yang ditunjukkan oleh nilai minimum rasio pertumbuhan ekonomi yang negatif. Walaupun demikian, pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya peningkatan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nilai maksimum rasio pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebelum pandemi dan kemudian berangsur membaik setelah tahun 2020. Selanjutnya,

standar deviasi dari pertumbuhan ekonomi relatif stabil kecuali pada tahun 2020, yang menunjukkan variasi yang lebih besar selama masa kontraksi ekonomi, mengindikasikan bahwa beberapa daerah mampu pulih lebih cepat dibandingkan yang lain.

### Analisis Regresi Data Panel

Dilakukan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pemilihan model regresi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan persamaan regresi, yaitu sebagai berikut.

$$KKD = 3,864380 + 0,999351PAD + 0,066810BM + \varepsilon.$$

Selanjutnya, dilakukan uji keberartian regresi (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi (uji t) sebagai berikut.

Tabel 4. Uji Keberartian Regresi (Uji F) dari Model Regresi Data Panel

F-statistic	987.2774
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Output Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}(987,2774) > F_{tabel}(3,0648)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini berarti dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 5. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji F) dari Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.864380	1.252931	3.084273	0.0026
X1	0.999351	0.046522	21.48143	0.0000
X2	0.066810	0.024950	2.677707	0.0086

Sumber: Data Output Eviews 12

Berdasarkan tabel hasil uji keberartian koefisien regresi, variabel pendapatan asli daerah memperoleh nilai  $t_{hitung}(21,48143) > t_{tabel}(1,9780)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, hasil uji keberartian koefisien regresi dari variabel belanja modal memperoleh nilai  $t_{hitung}(2,6777) > t_{tabel}(1,9780)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam kerangka teori keagenan, PAD yang tinggi memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah sebagai agen bekerja lebih efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Ketika PAD dikelola dengan baik, maka kemandirian keuangan daerah akan

meningkat. Prinsipal mendapatkan manfaat dari layanan publik yang lebih baik, sementara agen lebih termotivasi untuk menggunakan dana secara lebih efisien dan akuntabel. Hal ini menciptakan siklus yang positif dimana PAD yang kuat mendukung kemandirian keuangan, dan kemandirian keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Akbar (2022), Malau & Simarmata (2020), dan juga Rivandi & Anggraini (2022), yang hasilnya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal dianggarkan untuk kegiatan investasi dalam jangka panjang, meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan proyek-proyek besar lainnya. Ketika anggaran belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur dan proyek-proyek bagi kepentingan masyarakat, hal tersebut berhasil menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal atau masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Bella (2022), Ariani & Putri (2016), dan Hermawan & Solehudin (2023) yang hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Analisis Regresi Variabel Moderasi

Dilakukan analisis regresi variabel moderasi untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$KKD = -2,883266 + 1,253653PAD + 0,159611BM - 0,044696PE - 0,001724PAD * PE - 0,002540BM * PE + \varepsilon.$$

Selanjutnya, dilakukan juga uji keberartian regresi (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi (uji t) sebagai berikut.

Tabel 6. Uji Keberartian Regresi (Uji F) dari Model Regresi Variabel Moderasi

F-statistic	1609.284
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Output Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}(1.609,284) > F_{tabel}(3,0648)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini berarti dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 7. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji F) dari Model Regresi Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
W	-0.044696	0.203606	-0.219520	0.8266
X1W	-0.001724	0.005076	-0.339538	0.7348
X2W	-0.002540	0.010541	-0.240952	0.8100

Sumber: Data Output Eviews 12

Berdasarkan tabel hasil uji keberartian koefisien regresi, variabel interaksi pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai  $-t_{hitung}(-0,3395) > -t_{tabel}(-1,9780)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, hasil uji keberartian koefisien regresi dari variabel interaksi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai  $-t_{hitung}(-0,2409) > -t_{tabel}(-1,9780)$ , maka  $H_0$  dari penelitian ini diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini mengungkapkan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD maupun belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta dapat meningkatkan PAD maupun belanja modal untuk mendorong tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani & Erinos (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah ditimbulkan oleh adanya benturan kepentingan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam pemerintahan. Idealnya, pemerintah daerah senantiasa mendukung dan berfokus pada program-program jangka panjang yang berpotensi meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun jika hal tersebut tidak terlaksana atau dengan kata lain dana PAD dipergunakan untuk program yang sifatnya tidak meningkatkan kapasitas ekonomi dan infrastruktur publik dalam jangka panjang, maka walaupun pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan PAD dalam mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, hasil dari peningkatan kemandirian keuangan tersebut tidak akan maksimal.

Belanja modal idealnya diinvestasikan untuk mendukung proyek infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas publik lainnya yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Walaupun terdapat pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah daerah tidak mengelola belanja modal dengan baik, maka dana yang dianggarkan untuk belanja modal tersebut tidak akan maksimal. Misalnya,

jika terdapat pembangunan jalan di tempat yang tidak strategis atau dibangunnya fasilitas publik yang tidak dibutuhkan, hal tersebut tidak akan membantu meningkatkan pendapatan daerah yang dan juga dampaknya terhadap kemandirian keuangan tidak akan besar. Maka penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola anggaran belanja modal dengan baik agar mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai kemandirian keuangan yang signifikan.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2018-2022, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah sebesar 22,74% yang menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai rata-rata rasio belanja modal diperoleh sebesar 15,45% yang menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Diperoleh nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 27,62% yang menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Selain itu, nilai rasio pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar 3,71% yang menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hasil uji keberartian koefisien regresi (uji t) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### 6. REFERENCES

- Akbar, A. (2022). The Effect of Regional Native Income and Capital Expenditure On Regional Financial Independence in District /City Governments in West Java Province Year 2016 -2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 884–890. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561>
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(05), 675–683. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i5.562>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). Penerbit UPP AMP YPKN.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>

- Hermawan, R. R., & Solehudin. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 7434–7450.
- Ishak, J. F., Megawati, L. R., & Fadillah, A. (2020). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 1–8.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah - Edisi Terbaru (III)*. Penerbit ANDI.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6). <https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2166>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method) (Sutopo)*. Penerbit Alfabeta.